

Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Berbasis Gender: Studi Model Kesetaraan dalam Sistem Segregasi di MTs Al-Khoirot Malang

Deni Malik^{1*}, M Rauhul Mufid²

¹Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Indonesia

²Al-Azhar University, Cairo, Egypt

Email: denitaedap@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan Islam berbasis gender melalui model segregasi dengan tetap menjamin kesetaraan akses di MTs Al-Khoirot Malang. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada praktik pemisahan kelas, gedung, dan guru berdasarkan gender yang lazim dalam tradisi pesantren, namun di sisi lain tetap mengedepankan prinsip keadilan dalam akses pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam makna, praktik, serta budaya gender yang berkembang dalam konteks tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MTs Al-Khoirot menerapkan model gender-segregated but access-equal education, yaitu pemisahan fisik antara siswa laki-laki dan perempuan yang diimbangi dengan pemberian akses pembelajaran, fasilitas, serta kesempatan kegiatan yang relatif setara. Pada level kebijakan formal, tidak selalu ditemukan aturan tertulis yang secara eksplisit mengatur kesetaraan gender, namun praktik yang berlangsung mencerminkan keadilan distributif. Pada level implementasi, kurikulum yang digunakan sama antara siswa putra dan putri, kegiatan organisasi seperti OSIS berjalan secara paralel, serta terdapat pembagian peran guru berdasarkan gender yang selaras dengan nilai-nilai pesantren. Kebaruan penelitian ini terletak pada konsep kesetaraan gender berbasis segregasi pesantren yang mengintegrasikan struktur, mekanisme, nilai, dan dampak secara holistik, sehingga menghasilkan model kebijakan pendidikan yang adil sekaligus kontekstual.

Article History

Received : July 2026

Revised : August 2026

Accepted : September 2026

Kata kunci:

Pendidikan Islam berbasis gender, Segregasi kelas, Kesetaraan gender, Kebijakan pendidikan gender, Model kesetaraan gender di Madrasah Tsanawiyah Al-Khoirot.

Cara Mengutip:

Malik, Deni., Mufid, M. R. (2026). Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Berbasis Gender: Studi Model Kesetaraan dalam Sistem Segregasi di Mts Al-Khoirot Malang. *JIWO: Journal of Islamic Worldview*, 1 (3), 169-185

PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender dalam pendidikan merupakan perhatian penting dalam pembangunan sosial karena berkaitan langsung dengan keadilan, akses, dan kualitas sumber daya manusia (Zaironi, 2025; Zaironi et al., 2026). Penelitian ini menjadi penting mengingat pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu (Antika et al., 2026; Fakhridana et al., 2026; Faruq et al., 2026), tetapi juga sebagai ruang pembentukan nilai (Acetylena & Zaironi, 2026; Muzedi & Zaironi, 2026; Rahmania &

Kurnia, Fitri Ayu, 2026; Sholihah et al., 2026) dan identitas sosial yang inklusif. Secara konseptual, kesetaraan gender menuntut adanya perlakuan yang adil dalam akses, partisipasi, dan hasil pendidikan tanpa diskriminasi berbasis jenis kelamin. Namun, dalam konteks masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan kuat seperti pesantren (Afandy et al., 2026; A. N. Anwar et al., 2026; Firghol et al., 2026; Maqfiroh et al., 2025), praktik pendidikan sering kali mengadopsi sistem segregasi gender. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana prinsip kesetaraan dapat diwujudkan dalam sistem yang secara struktural memisahkan laki-laki dan perempuan. Bukti empiris menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan masih terjadi di berbagai wilayah (Azaim et al., 2025; FA et al., 2026; Faruq et al., 2026; Laisaan et al., 2026), meskipun kebijakan formal telah mendorong kesetaraan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji model alternatif yang mampu mengintegrasikan nilai keagamaan dengan prinsip keadilan sosial secara kontekstual.

Permasalahan umum yang dihadapi masyarakat terkait pendidikan berbasis gender terletak pada adanya ketegangan antara prinsip kesetaraan dan praktik budaya yang mengakar. Di satu sisi, kebijakan pendidikan nasional dan global menekankan pentingnya kesetaraan gender sebagai bagian dari hak asasi manusia (Bisri et al., 2026; Luluk Ananta, Fajriah, 2025; Nia Hasanah, Muchammad Syamsul Ma'arif, Nurul Ma'rifah, 2025). Di sisi lain, terdapat praktik sosial dan keagamaan tertentu yang mengedepankan pemisahan peran antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam ruang pendidikan (Ain, 2025; Nurhidayati, 2025; Zulfa & Wahidi, 2026). Kondisi ini sering kali menimbulkan persepsi bahwa segregasi identik dengan diskriminasi, meskipun tidak selalu demikian dalam praktiknya. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap konsep keadilan distributif menyebabkan kebijakan pendidikan sering diukur hanya dari aspek kesamaan perlakuan, bukan kesetaraan hasil atau peluang (C. Anwar et al., 2025; Fadilah et al., 2025; Supardi et al., 2025). Akibatnya, muncul kesenjangan dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada akses dan partisipasi siswa. Permasalahan ini menuntut adanya kajian mendalam yang tidak hanya melihat struktur formal, tetapi juga praktik nyata di lapangan.

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya variasi praktik pendidikan Islam berbasis gender yang tidak selalu sejalan dengan asumsi umum tentang ketidakadilan. Salah satu contoh menarik adalah praktik di MTs Al-Khoirot Malang yang menerapkan pemisahan kelas, gedung, dan guru berdasarkan gender, namun tetap memberikan akses pembelajaran yang setara bagi siswa laki-laki dan perempuan (Zaironi, 2025; Zaironi & Maulidia, 2026). Dalam konteks ini, kesetaraan tidak diartikan sebagai kesamaan ruang fisik, melainkan sebagai kesamaan kesempatan dalam memperoleh pendidikan, fasilitas, serta partisipasi dalam kegiatan seperti organisasi siswa dan kompetisi. Fenomena ini menunjukkan bahwa segregasi tidak selalu berimplikasi negatif, melainkan dapat menjadi strategi kontekstual dalam

menjaga nilai-nilai budaya dan keagamaan. Selain itu, adanya organisasi OSIS yang berjalan paralel antara putra dan putri mencerminkan upaya institusi dalam memastikan distribusi kesempatan yang adil. Oleh karena itu, fenomena ini perlu dikaji secara sistematis untuk memahami dinamika yang terjadi.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas isu gender dalam pendidikan dengan berbagai pendekatan, baik dari perspektif kebijakan, sosiologis, maupun pedagogis. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menekankan pentingnya integrasi gender dalam kurikulum, peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, serta penghapusan praktik diskriminatif di lingkungan sekolah (Aragónés-González et al., 2020; Chisamya et al., 2012). Beberapa studi juga mengkaji dampak positif pendidikan campuran (co-education) dalam meningkatkan interaksi sosial dan kesetaraan (Evans, 2014; A. Khan et al., 2025; Morales & Castellsagué, 2024). Namun demikian, sebagian besar penelitian cenderung memandang segregasi gender sebagai bentuk ketidaksetaraan tanpa mempertimbangkan konteks budaya dan nilai lokal (Blackburn et al., 2000, 2002; Bridges, 2003; Levanon & Grusky, 2016). Pendekatan yang digunakan sering kali bersifat normatif dan kurang menggali praktik empiris di lembaga pendidikan berbasis pesantren. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kesetaraan dapat diwujudkan dalam sistem yang berbeda secara struktural. Dengan demikian, diperlukan kajian yang mampu menjembatani perspektif normatif dan realitas kontekstual.

Selain itu, terdapat keterbatasan dalam penelitian sebelumnya yang belum secara mendalam mengkaji mekanisme implementasi kesetaraan dalam sistem segregasi. Banyak studi hanya berfokus pada aspek kebijakan formal tanpa melihat bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dalam praktik sehari-hari. Padahal, implementasi kebijakan sering kali dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan struktur sosial yang kompleks (Gollata et al., 2021; Wang & Li, 2025). Kesenjangan ini menunjukkan adanya research gap yang signifikan, terutama dalam memahami hubungan antara segregasi fisik dan kesetaraan akses. Penelitian yang ada juga belum banyak mengkaji konsep keadilan distributif sebagai kerangka analisis dalam pendidikan berbasis gender. Akibatnya, diskursus tentang kesetaraan cenderung terbatas pada kesamaan perlakuan, bukan pada keadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan holistik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model kesetaraan gender berbasis segregasi pesantren yang mengintegrasikan struktur, mekanisme, nilai, dan dampak secara komprehensif. Model ini tidak hanya melihat segregasi sebagai pemisahan fisik, tetapi juga sebagai bagian dari strategi institusional dalam menjaga nilai-nilai keagamaan sekaligus memastikan keadilan akses pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang tidak menempatkan

segregasi dan kesetaraan sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan sebagai konsep yang dapat berjalan secara sinergis. Pentingnya penelitian ini juga terletak pada kontribusinya dalam memperkaya kajian kebijakan pendidikan berbasis gender, khususnya dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi pendidikan yang lebih inklusif dan kontekstual.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pendidikan berbasis gender dalam sistem segregasi di MTs Al-Khoirot Malang dapat mewujudkan kesetaraan akses. Argumen yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa segregasi gender tidak secara otomatis menghasilkan ketidakadilan, selama diimbangi dengan mekanisme distribusi akses yang setara. Dengan kata lain, keadilan dalam pendidikan tidak hanya ditentukan oleh struktur, tetapi juga oleh praktik dan nilai yang mendasarinya. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman baru tentang bagaimana konsep keadilan distributif dapat diterapkan dalam konteks pendidikan berbasis pesantren. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan model implementasi kebijakan yang dapat direplikasi atau diadaptasi oleh lembaga pendidikan lain dengan karakteristik serupa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dan teoretis yang signifikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Gammelgaard, 2017; Monaro et al., 2022) untuk memahami implementasi kebijakan pendidikan Islam berbasis gender dalam sistem segregasi di MTs Al-Khoirot Malang. Pendekatan ini dipilih untuk menafsirkan makna, praktik, dan dinamika sosial dalam konteks pendidikan berbasis gender. Studi kasus memungkinkan eksplorasi secara mendalam dan kontekstual terhadap hubungan kebijakan, praktik, serta nilai pesantren dalam penerapan model *gender-segregated but access-equal education*.

Lokasi penelitian adalah MTs Al-Khoirot Malang, lembaga pendidikan berbasis pesantren yang menerapkan segregasi gender dalam pembelajaran. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive karena memiliki karakteristik khas berupa pemisahan kelas, gedung, dan tenaga pengajar berdasarkan gender, namun tetap memberikan kesetaraan akses pendidikan. Keseimbangan fasilitas, kurikulum, dan kegiatan ekstrakurikuler antara siswa laki-laki dan perempuan menjadikan lokasi ini relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan pendidikan berbasis gender.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Eppich et al., 2019; N. Khan et al., 2025). Observasi digunakan untuk mengamati praktik pembelajaran, interaksi sosial, dan kegiatan berbasis gender. Wawancara dilakukan dengan kepala madrasah, guru, dan siswa untuk memahami kebijakan, implementasi, serta persepsi terhadap segregasi dan kesetaraan akses.

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui kurikulum, jadwal kegiatan, dan arsip kelembagaan. Triangulasi teknik dilakukan untuk meningkatkan kedalaman dan keandalan data. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan (Im et al., 2023; Mezmir, 2020). Kondensasi dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data sesuai tujuan penelitian. Data selanjutnya disajikan secara naratif untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antartemuan. Verifikasi dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan konsistensi temuan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode, *member check*, ketekunan pengamatan, serta kecermatan analisis untuk menghasilkan temuan kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Berbasis Gender: Studi Model Kesetaraan dalam Sistem Segregasi di MTs Al-Khoirot Malang

Implementasi kebijakan pendidikan Islam berbasis gender dalam penelitian ini secara operasional dimaknai sebagai proses penerapan pengaturan pendidikan yang mempertimbangkan perbedaan gender melalui segregasi ruang, kelas, dan tenaga pendidik, tetapi tetap menjamin kesetaraan hak dan kesempatan pendidikan bagi peserta didik laki-laki dan perempuan. Kesetaraan tidak ditempatkan sebagai kesamaan bentuk fisik, melainkan sebagai keseimbangan dalam memperoleh kurikulum, pembelajaran, fasilitas, kegiatan pengembangan diri, serta peluang berpartisipasi dalam kehidupan kelembagaan madrasah. Dalam konteks MTs Al-Khoirot Malang, segregasi merupakan bagian dari tata kelola pendidikan yang dipengaruhi nilai dan tradisi kepesantrenan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemisahan tersebut tidak diarahkan untuk membatasi kesempatan salah satu kelompok gender, tetapi menjadi mekanisme pengelolaan pendidikan yang berjalan paralel. Dengan demikian, implementasi kebijakan memperlihatkan hubungan antara struktur segregatif, distribusi sumber daya, nilai kepesantrenan, dan kesetaraan akses.

Tabel 1. Praktik Kesetaraan Pendidikan dalam Implementasi Segregasi Gender

Petikan Wawancara	Indikator	Informan
“Pembelajaran putra dan putri dipisahkan, tetapi materi dan tujuan pembelajarannya tetap mengacu pada kurikulum yang sama.”	Kesetaraan kurikulum dan pembelajaran	Kepala Madrasah
“Kelas dan ruang belajar memang berbeda, namun fasilitas pembelajaran diberikan sesuai kebutuhan masing-masing dan tidak dimaksudkan untuk membedakan hak pendidikan.”	Kesetaraan fasilitas dan akses	Kepala Madrasah

"Guru putra mengajar siswa putra dan guru putri mengajar siswa putri, terutama untuk menjaga tata tertib dan nilai kepesantrenan."	Pembagian tenaga pendidik berdasarkan gender	Guru
"Kegiatan siswa tetap berjalan untuk putra dan putri. Mereka mempunyai ruang organisasi dan kegiatan pengembangan diri masing-masing."	Kesetaraan partisipasi dan organisasi	Guru Pembina
"Kami tetap memperoleh kesempatan mengikuti pembelajaran, kegiatan, dan pengembangan kemampuan meskipun ruangnya terpisah."	Kesetaraan kesempatan peserta didik	Siswa
"Pemisahan bukan berarti salah satu pihak mendapatkan lebih sedikit. Sistemnya dibuat berjalan paralel sesuai aturan madrasah dan pesantren."	Keadilan distributif dalam segregasi	Pengelola Madrasah

Data wawancara memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan gender di MTs Al-Khoirot tidak dapat dipahami hanya melalui keberadaan pemisahan ruang pendidikan. Informasi dari kepala madrasah, guru, pembina, dan siswa menunjukkan adanya mekanisme paralel yang berfungsi menjaga keseimbangan hak pendidikan antarkelompok gender. Kesamaan kurikulum menjadi indikator penting karena menunjukkan bahwa segregasi tidak diikuti diferensiasi tujuan pembelajaran. Demikian pula, pembagian guru berdasarkan gender lebih mencerminkan pengaturan kelembagaan yang berkaitan dengan norma kepesantrenan daripada pembatasan kesempatan belajar. Perspektif keadilan distributif tampak ketika fasilitas, kegiatan, dan kesempatan pengembangan diri diberikan kepada kedua kelompok secara relatif seimbang. Dengan demikian, struktur segregatif bekerja bersama mekanisme pemerataan akses. Temuan ini menunjukkan bahwa ukuran kesetaraan dalam konteks tersebut lebih tepat dilihat dari distribusi sumber daya, kesempatan, dan partisipasi daripada kesamaan ruang fisik.

Temuan tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan antara kesetaraan sebagai *sameness* dan kesetaraan sebagai *fair access*. Sistem pendidikan di MTs Al-Khoirot tidak menghapus perbedaan struktural antara siswa laki-laki dan perempuan, tetapi mengupayakan agar perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi ketimpangan kesempatan. Segregasi kelas, gedung, dan guru menjadi struktur pengelolaan, sedangkan kurikulum yang sama, fasilitas yang relatif seimbang, serta kegiatan organisasi yang berjalan paralel menjadi mekanisme kompensatoris yang menjaga keadilan akses. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan berbasis gender dapat memiliki bentuk yang kontekstual ketika diterapkan dalam lingkungan pesantren. Namun, kesetaraan tersebut tetap perlu dilihat secara kritis karena keseimbangan akses tidak otomatis membuktikan

kesamaan pengalaman pendidikan. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan harus dipahami melalui hubungan antara aturan kelembagaan, praktik harian, distribusi sumber daya, dan pengalaman siswa dalam menjalani proses pendidikan.

Hasil observasi memperkuat temuan wawancara bahwa segregasi gender berlangsung secara nyata dalam pengorganisasian ruang pembelajaran dan penempatan tenaga pendidik. Siswa laki-laki dan perempuan mengikuti proses pendidikan dalam lingkungan yang dipisahkan, tetapi aktivitas akademik tetap menunjukkan pola yang relatif paralel. Kesamaan arah pembelajaran, pelaksanaan kegiatan, serta kesempatan pengembangan diri memperlihatkan bahwa pemisahan fisik tidak serta-merta menghasilkan pemisahan kualitas pendidikan. Peneliti juga mengamati bahwa kegiatan siswa diselenggarakan melalui mekanisme yang memungkinkan kedua kelompok memperoleh ruang aktualisasi masing-masing. Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi tersebut menunjukkan adanya konsistensi antara struktur kelembagaan dan praktik pendidikan. Segregasi berfungsi sebagai instrumen pengaturan interaksi berdasarkan nilai kepesantrenan, sedangkan prinsip kesetaraan diwujudkan melalui distribusi kesempatan. Dengan demikian, observasi memperlihatkan pola *segregated structure with parallel access*, yaitu struktur terpisah yang tetap mempertahankan keseimbangan kesempatan pendidikan.

Secara sederhana, data penelitian dapat dinyatakan kembali bahwa MTs Al-Khoirot menerapkan pendidikan yang memisahkan siswa laki-laki dan perempuan dalam aspek tertentu, tetapi tidak memisahkan hak mereka untuk memperoleh pendidikan. Pemisahan terlihat pada ruang kelas, lingkungan pembelajaran, serta penempatan guru, sedangkan kesetaraan terlihat pada penggunaan kurikulum, kesempatan mengikuti pembelajaran, fasilitas, kegiatan pengembangan diri, dan ruang organisasi siswa. Dengan demikian, inti temuan penelitian bukan terletak pada ada atau tidaknya segregasi, melainkan pada bagaimana segregasi tersebut dikelola agar tidak berubah menjadi ketimpangan akses. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa struktur pendidikan dan prinsip keadilan dapat berjalan secara bersamaan ketika terdapat mekanisme distribusi yang relatif seimbang. Model ini dapat dirumuskan sebagai pendidikan tersegregasi dengan akses setara, yaitu suatu pola kelembagaan yang mempertahankan batas struktural gender sekaligus memastikan kedua kelompok memperoleh peluang pendidikan yang sebanding.

Tabel 2. Pengaruh Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Berbasis Gender

Jabatan Informan	Petikan Wawancara	Indikator
Kepala Madrasah	"Pemisahan putra dan putri membantu madrasah menjaga tata kelola pendidikan sesuai dengan nilai pesantren, sementara hak belajar tetap diberikan secara seimbang."	Kesesuaian kebijakan dengan nilai kelembagaan

Guru	“Dengan pembagian kelas dan guru, proses pembelajaran lebih mudah diarahkan sesuai karakter lingkungan pendidikan pesantren.”	Efektivitas pengelolaan pembelajaran
Guru Pembina/ Organisasi	“Kegiatan siswa tetap diberikan kepada putra dan putri melalui ruang organisasi masing-masing sehingga keduanya mempunyai kesempatan berlatih tanggung jawab.”	Pengembangan kepemimpinan dan partisipasi
Siswa	“Walaupun tempat belajar berbeda, kami tetap mendapatkan pelajaran dan kesempatan kegiatan yang diperlukan.”	Persepsi terhadap kesetaraan akses
Pengelola Madrasah	“Pola ini membantu menjaga aturan pesantren tanpa mengurangi kesempatan siswa untuk berkembang.”	Keseimbangan nilai, struktur, dan kesempatan

Data tersebut menunjukkan bahwa pengaruh ideal implementasi kebijakan pendidikan Islam berbasis gender berada pada kemampuan sistem mengintegrasikan kepatuhan terhadap nilai kelembagaan dengan pemenuhan hak pendidikan peserta didik. Bagi pengelola, segregasi memberikan kerangka pengorganisasian yang dianggap selaras dengan tata kehidupan pesantren. Bagi guru, struktur tersebut memudahkan pengaturan pembelajaran dan interaksi dalam batas-batas yang telah ditetapkan lembaga. Sementara itu, keberadaan kegiatan organisasi yang berjalan paralel memberikan ruang bagi siswa laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan tanggung jawab, partisipasi, dan kepemimpinan. Dengan demikian, pengaruh kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga pedagogis dan kelembagaan. Namun, pengaruh tersebut ideal apabila kesetaraan akses benar-benar dipertahankan dalam distribusi fasilitas, mutu pembelajaran, kesempatan pengembangan diri, dan partisipasi. Artinya, keberhasilan model tidak ditentukan oleh segregasi semata, tetapi oleh kemampuan lembaga menjaga keseimbangan kesempatan di balik struktur yang berbeda.

Secara kritis, data menunjukkan bahwa pengaruh ideal kebijakan dapat dipahami melalui tiga hubungan utama, yaitu struktur, mekanisme, dan hasil yang diharapkan. Struktur segregasi menyediakan batas kelembagaan antara kelompok siswa laki-laki dan perempuan; mekanisme paralel memastikan bahwa batas tersebut tidak menghilangkan akses terhadap sumber daya pendidikan; sedangkan hasil yang diharapkan berupa keteraturan, keberlangsungan nilai kepesantrenan, serta kesempatan pengembangan siswa yang relatif seimbang. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan tidak bekerja secara otomatis. Efek positif secara kelembagaan bergantung pada konsistensi penerapan prinsip kesetaraan dalam praktik sehari-hari. Apabila fasilitas, kurikulum, tenaga pendidik, kegiatan, dan peluang kepemimpinan tersedia secara proporsional bagi kedua kelompok, segregasi

dapat berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan konteks. Sebaliknya, apabila distribusi tersebut tidak seimbang, pemisahan struktural berpotensi menghasilkan kesenjangan. Karena itu, indikator kesetaraan menjadi elemen pengendali utama dalam implementasi kebijakan.

Pola data penelitian menunjukkan konfigurasi yang konsisten antara pemisahan struktural dan pemerataan kesempatan. Pada tingkat struktur, segregasi tampak melalui pemisahan siswa berdasarkan gender, termasuk ruang belajar dan penempatan guru. Pada tingkat proses, terdapat mekanisme paralel berupa kesamaan kurikulum, penyelenggaraan kegiatan, pemberian fasilitas, serta kesempatan pengembangan diri. Pada tingkat nilai, praktik tersebut berkaitan dengan upaya mempertahankan tata kehidupan pesantren dan norma interaksi antara laki-laki dan perempuan. Pada tingkat dampak, pola tersebut mengarah pada keteraturan pengelolaan pendidikan sekaligus pemeliharaan akses yang relatif setara. Dengan demikian, keseluruhan data membentuk pola segregasi → pengaturan paralel → distribusi akses → partisipasi setara. Pola ini memperlihatkan bahwa segregasi dan kesetaraan tidak ditempatkan sebagai dua kondisi yang mutlak berlawanan. Keduanya berinteraksi melalui mekanisme kelembagaan yang menentukan apakah perbedaan struktur menghasilkan keadilan atau justru ketimpangan.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan Islam berbasis gender di MTs Al-Khoirot Malang dibangun melalui pola segregasi struktural yang tetap mempertahankan kesetaraan akses pendidikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Zaironi yang secara khusus menemukan bahwa MTs Al-Khoirot menerapkan segregasi komprehensif antara siswa laki-laki dan perempuan, termasuk ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, lapangan, dan fasilitas ekstrakurikuler. Kesamaan tersebut memperkuat bahwa segregasi dalam konteks Al-Khoirot bukan sekadar pemisahan fisik, melainkan bagian dari tata kelola pendidikan. Temuan ini juga sesuai dengan UNESCO yang memaknai kesetaraan pendidikan melalui kesamaan hak, akses terhadap kesempatan belajar, sumber daya, perlindungan, dan manfaat pendidikan (Ainscow, 2020; Ossiannilsson, 2023a, 2023b; Öztemur et al., 2024). Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa kesetaraan tidak selalu diwujudkan melalui ruang pendidikan yang sama.

Temuan penelitian juga memiliki kesesuaian dengan studi mengenai kesetaraan gender di pesantren yang menunjukkan bahwa keadilan dapat diwujudkan melalui praktik pendidikan sehari-hari tanpa harus menghilangkan karakteristik kelembagaan pesantren (Sulton & Sunandito, 2026). Penelitian lain misalnya menemukan penerapan nilai keadilan dan kesetaraan gender melalui berbagai kegiatan kelembagaan dan pengalaman santri (Hafidzi et al., 2024; Sutrisno & Kuswandi, 2023; Wahyudin, 2020). Penelitian tentang Pesantren Sabilurrosyad juga menempatkan kesetaraan gender sebagai persoalan penting dalam relasi sosial

pendidikan pesantren (Sanah et al., 2021). Namun, penelitian ini memperlihatkan kekhususan yang berbeda, yaitu kesetaraan dibangun melalui struktur segregatif yang secara eksplisit memisahkan ruang pendidikan berdasarkan gender. Perbedaannya terletak pada mekanisme pencapaian kesetaraan: bukan melalui penghapusan pemisahan, tetapi melalui distribusi kurikulum, fasilitas, pembelajaran, dan kesempatan yang relatif seimbang.

Dari perspektif literatur internasional, temuan penelitian memperlihatkan bahwa indikator kesetaraan pendidikan perlu dipahami secara multidimensional. UNESCO menegaskan bahwa kesetaraan gender mencakup akses, isi pendidikan, praktik pembelajaran, lingkungan belajar, hasil pembelajaran, serta peluang kehidupan dan pekerjaan (Jemeli & Fakandu, 2019; Leproni & Azara, 2025; Mas'ud et al., 2025). Kerangka tersebut memperkuat temuan bahwa keberadaan segregasi fisik belum cukup untuk menentukan apakah suatu sistem pendidikan menghasilkan ketimpangan. Pada saat yang sama, UNESCO mengingatkan bahwa struktur sekolah, organisasi, distribusi sumber daya, interaksi guru, serta kurikulum dapat mereproduksi ketidaksetaraan gender apabila tidak dikelola secara adil (Akuffo, 2026; Jiang et al., 2025). Temuan MTs Al-Khoirot menunjukkan pola yang berbeda karena struktur segregasi disertai mekanisme akses paralel. Secara teoretis, kondisi tersebut memperluas analisis kesetaraan dari paradigma kesamaan bentuk menuju paradigma keadilan distribusi kesempatan.

Temuan penelitian selanjutnya sejalan dengan studi terbaru mengenai kurikulum pendidikan Islam responsif gender di Pondok Pesantren Al-Khoirot yang menunjukkan bahwa pemisahan kelas dan guru berdasarkan gender dapat berjalan bersama dengan pemberian akses pendidikan yang setara, perlindungan peserta didik, dan integrasi kurikulum formal dengan tradisi pesantren (Zaironi, 2025; Zaironi & Maulidia, 2026). Kesamaan lokasi dan karakteristik tersebut memperkuat konsistensi temuan bahwa responsivitas gender di Al-Khoirot tidak dimaknai sebagai pencampuran siswa laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai upaya menghadirkan keadilan, perlindungan, dan kesempatan belajar. Namun, penelitian ini memberikan pengembangan konseptual dengan menempatkan segregasi, mekanisme distribusi akses, nilai pesantren, dan dampak kelembagaan dalam satu kerangka implementasi kebijakan. Implikasi teoretisnya adalah perlunya memperluas konsep *gender equality* dalam pendidikan Islam agar mampu membaca variasi institusional yang lahir dari konteks budaya dan keagamaan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa hubungan antara segregasi dan kesetaraan tidak bersifat linear atau otomatis. Segregasi dapat menjadi struktur kelembagaan, sedangkan kesetaraan ditentukan oleh bagaimana lembaga mendistribusikan sumber daya, kesempatan, perlindungan, dan ruang partisipasi di dalam struktur tersebut. Perspektif ini melengkapi pandangan yang menempatkan kesetaraan terutama pada penghapusan hambatan berbasis gender (Amili, 2025;

Purnamasari, 2025). Literatur menunjukkan bahwa kesetaraan pendidikan juga berkaitan dengan pengalaman belajar, distribusi sumber daya, dan pemberdayaan peserta didik. Implikasi praktisnya, madrasah berbasis pesantren dapat menggunakan indikator kesetaraan yang lebih konkret (Abdullah et al., 2025; Isbah & Sakhiyya, 2023; Mu'alimin et al., 2026), seperti kesamaan kurikulum, proporsionalitas fasilitas, kualitas pembelajaran, kesempatan organisasi, akses pengembangan kompetensi, dan mekanisme perlindungan siswa. Dengan demikian, evaluasi kebijakan tidak berhenti pada bentuk segregasi, tetapi menilai kualitas distribusi kesempatan di antara kelompok gender.

Implikasi praktis lainnya berkaitan dengan pengembangan tata kelola pendidikan yang mampu mempertahankan nilai kepesantrenan sekaligus memenuhi prinsip keadilan pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan pentingnya mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan bahwa pemisahan ruang, kelas, dan guru tidak menghasilkan perbedaan kualitas layanan pendidikan. Hal ini relevan dengan kajian tentang kebijakan gender di pesantren yang mengidentifikasi pentingnya indikator terukur dan mekanisme pemantauan agar kebijakan kesetaraan tidak berhenti pada norma umum (Mala et al., 2025; Mubarok & Rakhman, 2026). Dengan demikian, model MTs Al-Khoirot dapat dipahami sebagai pola implementasi yang menghubungkan segregasi struktural, distribusi akses, nilai kepesantrenan, dan pengembangan peserta didik. Kontribusi utama penelitian terletak pada penegasan bahwa kesetaraan pendidikan perlu dianalisis berdasarkan substansi hak dan kesempatan yang diterima peserta didik, bukan semata-mata berdasarkan kesamaan bentuk organisasi pendidikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan Islam berbasis gender di MTs Al-Khoirot Malang memperlihatkan pola gender-segregated but access-equal education, yaitu pemisahan peserta didik berdasarkan gender yang tetap disertai upaya menjaga kesetaraan akses pendidikan. Hikmah utama penelitian adalah bahwa segregasi tidak dapat langsung dipahami sebagai bentuk ketidakadilan tanpa melihat mekanisme distribusi kesempatan di dalamnya. Kesetaraan justru tampak melalui kesamaan kurikulum, pembelajaran, fasilitas, kegiatan pengembangan diri, serta peluang partisipasi siswa laki-laki dan perempuan. Temuan ini memberikan pelajaran bahwa keadilan pendidikan bersifat kontekstual dan perlu mempertimbangkan nilai, budaya, struktur kelembagaan, serta kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, sistem pendidikan berbasis pesantren dapat mempertahankan karakter kepesantrenan sekaligus mengembangkan mekanisme yang mendukung pemerataan hak, kesempatan, dan partisipasi pendidikan bagi seluruh peserta didik secara proporsional.

Kekuatan penelitian terletak pada pengembangan perspektif bahwa kesetaraan gender tidak selalu diwujudkan melalui penghapusan segregasi, tetapi dapat dibangun melalui distribusi akses yang adil. Secara keilmuan, penelitian ini berkontribusi memperluas kajian kebijakan pendidikan Islam dengan menghubungkan segregasi, keadilan distributif, nilai kepesantrenan, dan implementasi kebijakan dalam satu kerangka analitis. Model ini memperkaya pemahaman mengenai variasi praktik kesetaraan gender dalam lembaga pendidikan Islam berbasis pesantren.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu madrasah dengan pendekatan studi kasus, sehingga temuan belum dapat digeneralisasikan pada seluruh lembaga pendidikan Islam. Data juga lebih menekankan praktik kelembagaan dan persepsi informan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan studi komparatif pada beberapa pesantren, melibatkan perspektif orang tua dan alumni, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menguji kesetaraan fasilitas, pengalaman belajar, partisipasi, dan capaian pendidikan antarkelompok gender.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Apresiasi disampaikan kepada pimpinan dan seluruh keluarga besar MTs Al-Khoirot Malang yang telah memberikan izin, informasi, serta kesempatan kepada penulis untuk melakukan pengumpulan data penelitian. Terima kasih juga disampaikan kepada para kepala madrasah, guru, pembina, dan peserta didik yang telah berpartisipasi secara terbuka selama proses penelitian. Penghargaan diberikan kepada rekan sejawat yang memberikan masukan akademik dalam penyempurnaan naskah. Semoga penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan Islam yang adil, kontekstual, dan berorientasi pada kesetaraan akses.

REFERENSI

- Abdullah, H., Mohd Zain, F. A., Juahir, H., Che Haron, H. I., Ismail, A., Islam, T., & Sheikh Ahmad Tajuddin, S. A. F. (2025). Developing Tahfiz empowerment index based on Maqasid Shariah. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18(5), 1066–1091.
- Acetylena, S., & Zaironi, M. (2026). Character formation through Islamic religious education: Integrating role modeling, habituation, contextual learning, and educational technology in an Indonesian madrasah. *Jurnal At-Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 151–166.
- Afandy, I., Alfaizah, Z., & Zaironi, M. (2026). Relevansi Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dengan Tantangan Era Society 5.0: The Relevance of the Islamic Religious Education Curriculum and Instruction to the Challenges

- of the Society 5.0 Era. *TA'LIMUNA: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 246–255.
- Ain, N. Q. (2025). Kesetaraan gender dalam perspektif sosiologi pendidikan: Analisis peran sekolah dalam membangun keadilan sosial. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2).
- Ainscow, M. (2020). Inclusion and equity in education: Making sense of global challenges: M. Ainscow. *Prospects*, 49(3), 123–134.
- Akuffo, A. G. (2026). Re-gendering Gender Parity Index: From conceptual limitations to contextual gender equality metrics. *Women's Studies International Forum*, 118, 103376.
- Amili, H. (2025). Analisis Hukum Terhadap Diskriminasi Gender Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Indonesia: Legal Analysis of Gender Discrimination in Indonesian Legislation. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4427–4442.
- Antika, A. N., Syafiulloh, I., & Zaironi, M. (2026). Pengembangan Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Budaya Lokal di Indonesia:(Urgensi dan Tantangannya). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 917–930.
- Anwar, A. N., Kholiq, A., & Zaironi, M. (2026). Transformasi Kebijakan Pendidikan Pesantren Indonesia melalui Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi dari PMA 13/2014 menuju UU 18/2019. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 17060–17076.
- Anwar, C., Komariyah, L., Aznem, A., Hasbar, H., Payung, L. T., & Kesuma, A. H. (2025). Evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia: Pendekatan CIPP dan perspektif keadilan sosial. *Journal of Education Research*, 6(3), 739–750.
- Aragón-González, M., Rosser-Limiñana, A., & Gil-González, D. (2020). Coeducation and gender equality in education systems: A scoping review. *Children and Youth Services Review*, 111, 104837.
- Azaim, M., Toib, T., Latif, A., & Zaironi, M. (2025). Evaluasi Kurikulum Sebagai Pendorong Kompetensi Siswa: Menggabungkan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Hasil Yang Holistik. *Khidmah: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2).
- Bisri, A. M., Suari, D., Ghofur, A., & Zaironi, M. (2026). Model Model Kurikulum Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam Subjek Akademik, Humanistik Dan Rekontruksi Sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1830–1835.
- Blackburn, R. M., Browne, J., Brooks, B., & Jarman, J. (2002). Explaining gender segregation. *The British Journal of Sociology*, 53(4), 513–536.
- Blackburn, R. M., Jarman, J., & Brooks, B. (2000). The puzzle of gender segregation and inequality: A cross-national analysis. *European Sociological Review*, 16(2), 119–135.
- Bridges, W. P. (2003). Rethinking gender segregation and gender inequality: Measures and meanings. *Demography*, 40(3), 543–568.

- Chisamya, G., DeJaeghere, J., Kendall, N., & Khan, M. A. (2012). Gender and education for all: Progress and problems in achieving gender equity. *International Journal of Educational Development*, 32(6), 743–755.
- Eppich, W. J., Gormley, G. J., & Teunissen, P. W. (2019). In-depth interviews. In *Healthcare simulation research: A practical guide* (pp. 85–91). Springer.
- Evans, A. (2014). Co-education and the erosion of gender stereotypes in the Zambian Copperbelt. *Gender & Development*, 22(1), 75–90.
- FA, M. A. N., Kedua, L. P., & Zaironi, M. (2026). Problematika Pendidikan Islam di Indonesia: Analisis Tantangan dan Arah Kebijakan di Era Transformasi Pendidikan. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(4), 1329–1337.
- Fadilah, F. Z., Rizanah, S., Naga, F. Y., Prayogi, G., Azizah, S. N., & Nasor, M. (2025). Analisis Kebijakan Dalam Pendidikan. *Unisan Jurnal*, 4(8), 108–119.
- Fakhridana, F. M., Azizah, S. N., & Annisa, Annisa, M. (2026). Integrasi Artificial Intelligence dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Meningkatkan Literasi Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 12(1), 208–220.
- Faruq, M. U., Adawiyah, R., & Zaironi, M. (2026). Analisis Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun terhadap Keberlangsungan Pendidikan Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 17714–17719.
- Firghol, M. H. F. M., Tripitasari, D., & Zaironi, M. (2026). Urgensitas Manajemen Perubahan Pendidikan Islam Di Era Globalisasi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(2), 1951–1959.
- Gammelgaard, B. (2017). The qualitative case study. In *The International Journal of Logistics Management* (Vol. 28, Issue 4, pp. 910–913). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/IJLM-09-2017-0231>
- Gollata, J. A. M., Kochskämper, E., Jager, N. W., & Newig, J. (2021). Participation in multi-level policy implementation: exploring the influence of governance culture. *Journal of Environmental Planning and Management*, 64(14), 2593–2617.
- Hafidzi, A., Nurdin, N., & Lutfi, L. (2024). Addressing gender bias and bullying in Islamic boarding schools: Challenges and solutions. *Muadalah*, 12(1), 39–50.
- Im, D., Pyo, J., Lee, H., Jung, H., & Ock, M. (2023). Qualitative research in healthcare: data analysis. *Journal of Preventive Medicine and Public Health*, 56(2), 100.
- Isbah, M. F., & Sakhiyya, Z. (2023). Pesantren in contemporary Indonesia: Negotiating between equity and the market. In *Education in Indonesia: Critical Perspectives on Equity and Social Justice* (pp. 137–152). Springer.
- Jemeli, C. M., & Fakandu, A. M. (2019). Equitable access to education and development in a knowledgeable society as advocated by UNESCO. *Educational Research and Reviews*, 14(6), 200–205.
- Jiang, Z., Niu, X., & Teng, J. (2025). A historical review and analysis of UNESCO's gender equality in education. *Asia Pacific Journal of Education*, 1–19.

- Khan, A., Ding, B. R., Khan, M. S., & Épiphanie, E. N. H. (2025). Exploring the intersection of tradition and modernity: Parents' perspectives on co-education in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. *African Journal of Reproductive Health*, 29(7), 94.
- Khan, N., Khalique, F., & Saini, K. (2025). Qualitative research methods: harnessing interviews, focus groups, observations, and document analysis. In *Qualitative research methods in air transport management* (pp. 27–56). IGI Global Scientific Publishing.
- Laisaan, R. A., Nabila, N., & Zaironi, M. (2026). Analisis Kritis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 16291–16310.
- Leproni, R., & Azara, L. (2025). "Women Must Not Be Left Behind": The UNESCO Path Towards Women's Empowerment.
- Levanon, A., & Grusky, D. B. (2016). The persistence of extreme gender segregation in the twenty-first century. *American Journal of Sociology*, 122(2), 573–619.
- Luluk Ananta, Fajriah, M. Z. (2025). Landasan filosofis, psikologis dan sosial budaya dalam pendidikan. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 9(12), 247–253.
- Mala, A., Chasanah, U., & Marpuah, S. (2025). Gender mainstreaming in the policy of islamic boarding school education: A systematic literature review. *An-Nisa' Journal of Gender Studies*, 18(1), 31–44.
- Maqfiroh, F., Sumarni, Y., & Zaironi, M. (2025). Integrasi Manajemen Kurikulum Berbasis Pesantren. *Jurnal Pendidikan Integratif*, 6(4).
- Mas' ud, F., Dwiputra, R., Kale, D. Y. A., & Kollo, F. L. (2025). Perspektif Gender dalam Dunia Pendidikan Teori dan Praktik. *Tangguh Denara Jaya Publisher*.
- Mezmir, E. A. (2020). Qualitative data analysis: An overview of data reduction, data display, and interpretation. *Research on Humanities and Social Sciences*, 10(21), 15–27.
- Monaro, S., Gullick, J., & West, S. (2022). Qualitative data analysis for health research: A step-by-step example of phenomenological interpretation. *Qualitative Report*, 27(4), 1040–1057. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5249>
- Morales, P. A., & Castellsagué, A. (2024). Co-education and the feminist perspective in centres of pedagogical renewal: A critical analysis. *Journal of Technology and Science Education*, 14(3), 844–860.
- Mu'alimin, M., Muhith, A. M., & Hepni, H. (2026). School principals' and teachers' perspectives on school quality management in Islamic schools: insights from Indonesia. *International Journal of Educational Management*, 40(4), 727–741.
- Mubarok, Z., & Rakhman, I. A. (2026). Fiqh Dimensions for Gender Equality in Pesantren Regulations. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 10(2), 580–598.
- Muzedi, H., & Zaironi, M. (2026). Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Praktik Sehari-hari di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Studi Etnografi. *Al-Zayn: Jurnal*

- Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3249–3260.
- Nia Hasanah, Muchammad Syamsul Ma'arif, Nurul Ma'rifah, M. Z. (2025). Tantangan Dan Solusi Dalam Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Madrasah. *Jurnal Pendidikan Ilmiah Transformatif*, 9(11), 109–117.
- Nurhidayati, V. (2025). Peran Pesantren dalam Pemberdayaan Perempuan: Kajian Perspektif Gender dalam Pendidikan Islam. *TSAQAFATUNA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 7(1).
- Ossiannilsson, E. (2023a). Open educational resources: A catalyst for social justice and equality. In *Open Educational Resources in Higher Education: A Global Perspective* (pp. 15–33). Springer.
- Ossiannilsson, E. (2023b). Open educational resources (OER) and some of the United Nations sustainable development goals. *The International Journal of Information and Learning Technology*, 40(5), 548–561.
- Öztemur, H., Karabağ, A., Öcel, M., & Zengin, O. (2024). Exploring the horizons of education: Insights from UNESCO's 2030 agenda. *International Journal of Eurasian Education and Culture*, 9(25), 167–179.
- Purnamasari, G. N. (2025). Mengatasi Ketimpangan Gender dengan Keterlibatan Ayah di Budaya Patriarkis Indonesia. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 5(1), 43–58.
- Rahmania, A. I., & Kurnia, Fitri Ayu, M. (2026). Teori Humanistik Dan Aplikasinya Dalam Pembelajaran PAI di MI Biba ' afadlrah Turen Malang. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4, 638–646. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3163>
- Sanah, B. F., Nafisah, I. W., Mukmina, M. Z., Cholid, S. A., & Prayoga, T. A. (2021). Implementasi Keadilan Gender di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Kota Malang. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(1), 113.
- Sholihah, S., Bahiyah, K., & Zaironi, M. (2026). Implementasi Pendekatan Deep Learning Terhadap Pembelajaran Fikih di MTs. Al-Khoirot. *Jurnal Al-Fatih*, 9(1), 382–402.
- Sulton, A., & Sunandito, V. E. (2026). Cultivating Moderate Islamic Education and Anti-Discrimination Values in Pesantren: An Ethnographic Study. *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah*, 11(2), 477–490.
- Supardi, S., Fauzi, A., Aminah, N., Maryati, M., & Nursaidah, N. (2025). Analisis kebijakan kesetaraan akses dan mutu pendidikan studi multidimensi pada sekolah menengah umum, madrasah dan pendidikan tinggi pesantren. *Jurnal Education And Development*, 13(1), 479–490.
- Sutrisno, A., & Kuswandi, I. (2023). Implementation Of Gender Equality Education In The Boarding School Tarbiyatul Mu'allimat Al-Islamiah Al-Amien Prenduan Sumenep. *IJIBS*, 1(2), 81–88.
- Wahyudin, W. (2020). The Dynamics of Gender Equality: The Girls Ddi Mangkoso

- Islamic Boarding School in South Sulawesi. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 19(1), 99–108.
- Wang, D., & Li, S. (2025). Social conflicts and their resolution paths in the commercialized renewal of old urban communities in China under the perspective of public value. *Journal of Urban Management*, 14(2), 402–417.
- Zaironi, M. (2025). Penguatan Kesetaraan Gender Berbasis Segregasi Kelas (Studi Kasus di MTs Al-Khoirot Malang). *Kabillah*, 10(2), 32–42.
- Zaironi, M., Masrukhan, A. Q., & Irawan, M. F. (2026). Penguatan Pendidikan Gender di MI NU An Nur Purworejo. *Journal of Innovative and Creativity Journal*, 5(3), 37120–37125.
- Zaironi, M., & Maulidia, N. (2026). Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Segregasi Kelas Dalam Meningkatkan Konsentrasi Belajar, Kepercayaan Diri Akademik, Karakter Islami, Dan Disiplin Siswa. *Kabillah*, 11(1).
- Zulfa, D. A., & Wahidi, K. (2026). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Kesadaran Gender di Masyarakat Muslim Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 79–83.